

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, F. (2018). Sistem Pengendalian Intern Atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT. Astra International Tbk Daihatsu. Repository.unp.ac.id. Diakses pada 2 April 2021.
- Bodnar, George H, Wiliam S, Hopwood. (2006). "Sistem Informasi Akuntansi", PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- BPKP Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP Dipetik Juni, 2, 2021 dari Slideshare.net
- Christa Najooan, H. S. (2016). Analisis Sistem Pemungutan Dan Penyetoran Retribusi Pasar Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu. *Jurnal Emba Vol.4 No.1 ISSN 2303-1174* , 1107-1117.
- Claudio V. Munaiseche, V. I. (2018). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Dan Penerimaan Retribusi Parkir Di Dinas Perhubungan Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4)* , 875-883.
- Keterlambatan Pembayaran Retribusi Pasar di Pasar Minulyo Kabupaten Pacitan. <https://www.terasjatim.com/kebiasaan-mbedol-mburi-pedagang-pasar-di-pacitan-belum-bayar-retribusi/>diakses pada 22 Maret 2021
- Krismiaji. (2002). *Sistem Informasi Akuntansi*. UPP AMP YKPN: Yogyakarta
- Djpk.Kemenkeu Tentang Retribusi Daerah Dipetik, Maret, 25, 2021 dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wpcontent/uploads/2018/08/retribusi_daerah.pdf.
- Juanda Jeniver Polii, I. E. (2018). Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerahkota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4)* , 693-697.
- Mamuaja, B. (2016). Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal Emba Vol. 4 No. 1ISSN 2303-1174* , 167-171.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Marshall B. Romney, P. J. (Edisi ke 13). *Sistem informasi Akuntansi*. Salemba Empat, 2013.
- Mubarok, D. H. (2016). Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusi Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *jurnal ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Vol. 18No. 2 ISSN Print: 1411-1713, issn online: 2528-150X*, 95-110.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- PEMERINTAH.NET. (2016). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pengertian COSO dipetik, Juli, 31, 2021 dari

<https://id.wikipedia.org/wiki/COSO>

Fdokumen. (2018) Pembinaan Sumber Daya Manusia dipetik, Juni, 29, 2021 dari

<https://fdokumen.com/document/32-spip-pembinaan-sumber-daya-manusia.html>

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan

PERBUP Nomor 56 Tahun 2018 Perubahan atas PERBUP Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Disperindag. Dinas dan Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Pacitan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pendisiplinan Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sitem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2018 Perubahan Atas PERDA Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Ramadhan Fachry. (2019). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas dan Pengendalian Internal Pada PT. Angkasa Pura Kargo. Jakarta:FEB-USAKTI.

Sengketa Lahan Pasar Tulakan Kabupaten Pacitan

<http://kampungberita.id/lahan-tidak-jelas-pedagang-pasar-tulakan-pacitan-wadul-dewan/> diakses pada 2 April 2021

Sitti Nurnaluri, H. W. (2019). Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Volume Iv ISSN (Online) : 2503-1635, Issn (Print): 2088-4656* , 379-407.

SPI PEMERINTAHAN dipetik pada April, 19, 2021 dari https://www.Academia.edu/28164913/SPI_Pemerintahan_pdf

Sugiyono. 2016. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D". Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah